

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR PEDESAAN DI DESA SUNGAI PADUAN KECAMATAN TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA

Oleh:
Reza Arista Saputra
NIM. E01109063

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak. 2015.

E-mail: rezaarista.ra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab kurang efektifnya implementasi program bantuan keuangan percepatan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. Penelitian ini diangkat dikarenakan masyarakat masih sangat kekurangan infrastruktur sumber air bersih, karena sebagian besar implementasi program infrastruktur dasar pedesaan tersebut berupa kegiatan-kegiatan proyek fisik. Sehingga membuat program belum tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III yang mengatakan dalam proses implementasi kebijakan publik mencakup empat tahapan yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Metode pengolahan data dalam penelitian di gunakan adalah deskriptif, yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program infrastruktur dasar pedesaan di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara adalah masyarakat belum mendapatkan informasi program infrastruktur dasar pedesaan dari pihak-pihak pelaksana program ditingkat desa, lemahnya sumberdaya manusia pelaksanaan program ditingkat desa yang belum kompeten dibidangnya dikarenakan latar belakang pendidikan sehingga program hanya berjalan apa adanya saja. Disposisi atau sikap pelaksana program di tingkat desa belum memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan program infrastruktur dasar pedesaan, para pelaksana program hanya mencari keuntungan dari kegiatan-kegiatan proyek fisik dan terciptanya struktur birokrasi tradisional di tingkat desa menciptakan ketergantungan aparat birokrasi di tingkat bawah kepada aparat birokrasi ditingkat atas. Untuk itu, rekomendasi yang di berikan antara lain Perlunya peningkatan sosialisasi dan waktu sosialisasi yang panjang dalam penyampaian Informasi program, pendampingan, bimbingan dan pembinaan baik melalui pelatihan-pelatihan serta pengawasan dalam implementasi program infrastruktur dasar pedesaan.

Kata-kata kunci : Dasar Infrastruktur, Desa, Implementasi Program, dan Kebijakan.

ABSTRACT

This research is intended to identify and analyze the factors that cause the poor effectiveness of implementation of the financial assistance program accelerated development of basic infrastructure in the Sungai Paduan village, Teluk Batang sub-district, Kayong Utara regency. This research is taken because of the poor water resources infrastructure, the most of implementation of rural basic infrastructure in the form of physical project activities. So that make the program has not been targeted according to the needs of society. This research uses the theory of George Edward III who said in public policy implementation the process includes four stages such as : communication, resource, disposition, bureaucratic structure. The method in processing this research use descriptive qualitative research. The results of the research showed that the implementation of rural basic infrastructure in Sungai Paduan village, Teluk Batang Sub-district, Kayong Utara regency is : the public has not been informed of rural basic infrastructure program of the parties implementing programs at the village, the weakness of human resources as implementing programs at the village is not competent in the region because of the educational background, so the program only runs it is just. Disposition or attitudes of the program implementers at the village have not yet committed to implementing the program of rural basic infrastructure, program implementers are just looking for a profit of physical project activities and creates of traditional bureaucratic structures at the village. Because of that creates dependency level bureaucracy under the top level bureaucratic apparatus. Therefore, recommendations given among others : the need for increased socialization and more time for socialization to give information of a program, mentoring, guidance, and fostering better through training and supervision in the implementation of rural basic infrastructure program.

Keywords : basic infrastructure, village, implementation of the program and wisdom.



PENDAHULUAN

Kabupaten Kayong Utara, merupakan salah satu kabupaten yang baru dan sedang berkembang, Mengingat bahwa kabupaten ini terbentuk pada tahun 2007. Terbilang masih baru dan belum berkembang seperti kabupaten-kabupaten lainnya.

Melihat kondisi seperti itu dibentuklah suatu program pembangunan untuk masyarakat pedesaan yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Kayong Utara. Maka banyak sekali pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah guna mewujudkan daerah yang layak untuk ditempati dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat, baik pembangunan di sektor ekonomi, sosial budaya maupun meningkatkan infrastruktur-infrastruktur dasar publik.

Landasan hukum tentang pelaksanaan pembangunan nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan undang-undang tersebut Kabupaten Kayong Utara menindaklanjuti dengan landasan hukum berupa Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Dasar Pedesaan pada pasal 1 Ayat 15, yang berbunyi “Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Infradades adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada desa untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan yang melibatkan masyarakat desa setempat secara langsung sesuai kebutuhan dasar masyarakat desa setempat, peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2012 di buat dan disahkan oleh Bupati pada tanggal 31 Mei 2012.

Tujuan dibentuknya program ini sesuai dijeaskan didalam Perbup No.14 Tahun 2012 Pasal 2 adalah “Tujuan dari pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pengawasan, pelaporan, pengendalian dan pemeliharaannya.
- b. Membangkitkan dan menumbuhkan kembangkan swadaya masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya local yang ada di desa dan.
- c. Mempercepat pemenuhan dan pemerataan pembangunan infrasruktur

dasar pedesaan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dari penjelasan Perbup No.14 Tahun 2012 Pasal 2 diatas dapat dipahami bahwa tujuan dari program infrastruktur dasar pedesaan adalah penyediaan infrastruktur mutlak dilakukan agar desa dapat tumbuh dan berkembang dan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera dan damai. Infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara sejalan program yang sedang berjalan. Program ini memiliki dampak positif untuk pemerataan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara apabila terlaksana dengan baik.

Ada pun jenis-jenis infrastruktur dasar yang dapat didanai dengan program Bantuan Keuangan Infrastruktur Dasar Pedesaan Sesuai dengan penjelasan Perbup No.14 Tahun 2012 pasal 12 adalah :

- a. Jalan Dusun
- b. Jalan penghubung antar Desa
- c. Jembatan
- d. Posyandu
- e. Sarana air bersih
- f. Normalisasi saluran air wilayah pemukiman

- g. Kegiatan rehabilitasi saluran/bendungan pada jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier usaha tani (JITUT) dan
- h. Jalan lingkungan
- i. Mandi, cuci, kakus, (MCK) dan
- j. Jenis infrastruktur lainnya yang menyangkut kebutuhan dasar.

Masyarakat di Desa Sungai Paduan sangat masih mengeluhkan tentang infrastruktur dasar desa yang masih sangat belum baik .Dari tahun ketahun masyarakat Desa Sungai Paduan sangatlah susah mendapatkan air bersih yang layak untuk di gunakan. Masyarakat Desa Sungai Paduan hanya menggunakan air sumur untuk keperluan sehari hari termasuk mandi dan kegiatan lainnya. air sumur yang kuning dan lengket tidaklah wajar untuk digunakan masyarakat untuk hidup sehat.

Masyarakat hanya berharap ke pada cuaca, ketika musim hujan masyarakat bisa mendapatkan air untuk keperluan sehari-hari, namun ketika musim kemarau masarakat sangat kekeringan air, terutama masyarakat menengah kebawah dan para petani yang mendapatkan beban atau tanggungan baru untuk membeli air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari masarakat, namun masalah air bersih di Desa Sungai

Paduan dari tahun ketahun tidak pernah bisa terselesaikan.

Masyarakat masih banyak belum atau kurang tau kelanjutan dari program infrastruktur dasar pedesaan dan apa saja kegiatannya, dalam pengajuan bantuan yang seharusnya melalui musawarah dusun, tetapi masyarakat tidak pernah diundang, seharusnya warga yang merupakan subyek dan sasaran dari program infrastruktur dasar pedesaan terlihat minim keterlibatan dan keikut-sertaan dalam proses kegiatan tersebut, bahkan masyarakat kurang tau informasi tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang didanai oleh program infrastruktur dasar pedesaan.

Lemahnya sumber daya manusia tampak dari kemampuan merencanakan kegiatan, kemampuan komunikasi dan kemampuan mengorganisasikan serta mengawasi kegiatan-kegiatan program. Sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program berjalan apa adanya saja, tidak tepat sasaran, tidak memberdayakan dan tidak menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Kurangnya komunikasi, lemahnya sumber daya manusia dan kurangnya kemauan para pelaksanan program ditingkat desa membuat kegiatan-kegiatan yang didanai oleh bantuan keuangan program

infrastruktur dasar pedesaan belum atau kurang efektif, belum tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memunuhi tujuan dari program infrastruktur dasar pedesaan yaitu mempercepat pemenuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan melihat penjelasan di atas, proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan dan pengusulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan proyek dan hasilnya belum maksimal peneliti ingin menggali lebih banyak informasi dan mengetahui lebih dalam mengenai program infrastruktur dasar pedesaan ini dan implementasinya di Desa Sungai Paduan. Maka dari itulah, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Implementasi Program Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan Di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara”.

Melihat adanya permasalahan yang terjadi dan akan diteliti yaitu mengenai masalah suatu program yang telah berjalan selama kurang lebih berjalan kurang dari tiga tahun (2012-2014), akan tetapi program tersebut belum efektif. Maka berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini

menfokuskan pada Efektifitas Implementasi Program Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan Di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis mengarahkan penelitian ini agar lebih jelas, peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut: Mengapa Implementasi Program Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan Belum atau Kurang Efektif Di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara.

KAJIAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Menurut George Edward III dalam Winarno, 2002:126), ada empat faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yaitu:

a. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:157-158), komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Edward III dalam Agustino (2008:158) ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

1. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
 2. Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan.
 3. Konsistensi, yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan dan dijalankan.
- b. Sumber Daya (*Resources*)

Edward III dalam Agustino (2008:158) mengemukakan bahwa sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Lebih lanjut Edward III menegaskan bahwa bagaimana jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

c. Disposisi (*Disposition*)

Menurut Edward III (2005:142) mengemukakan bahwa disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif terhadap implementasi kebijakan, maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi yang tinggi menurut Edward III dan Van Horn Matter berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

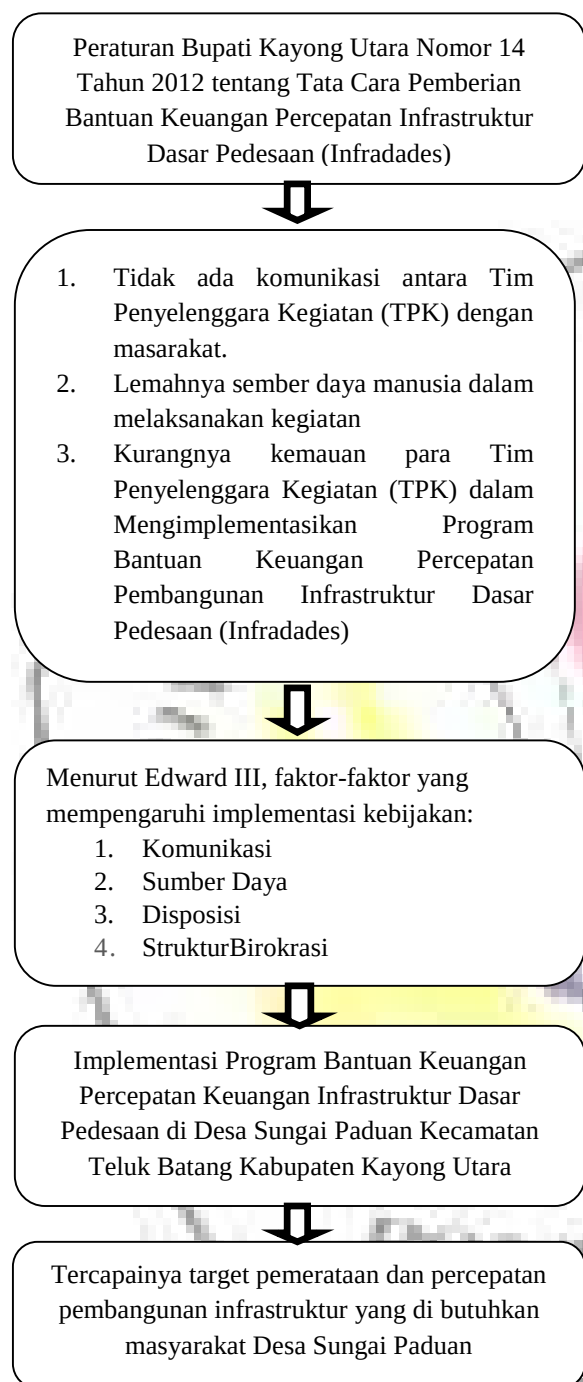
Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur

organisasi mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standar operation prodecure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Edward III, dengan argumentasi adalah bahwa penggunaan teori Edward III dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk di uji akan tetapi lebih sebagai panduan atau pedoman bagi penulis dalam rangka untuk melaksanakan penelitian lapangan.

Di lihat dari berbagai faktor Implementasi Kebijakan yang telah dikemukakan oleh Teori Edward III diatas, apabila dikaitkan dengan permasalahan penelitian ini dalam program infrastruktur dasar pedesaan di Desa Sungai Paduan adalah belum dan kurangnya komunikasi antara pelaksana program ditingkat desa dengan masyarakat, masih lemahnya kemampuan sumber daya manusia pelaksana program ditingkat desa serta kurangnya disposisi atau kemauan untuk melaksanakan program Infradades dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan program belum tercapai dengan efektif.

KERANGKA PIKIR PENELITIAN



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif.

Penelitian ini dikatakan bersifat deskriptif kualitatif karena berusaha dan mencoba memberi gambaran secermat mungkin tentang keadaan yang diteliti dengan mengeksplor kecenderungan perilaku. Penelitian deskriptif ini bertujuan mengungkapkan dan memecahkan masalah berdasarkan data-data terkumpul dan yang nampak sebagaimana adanya sesuai dengan kondisi saat penelitian ini dilaksanakan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Moleong (2011:6) metode penelitian kualitatif, penelitian yang untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN

A. Komunikasi

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerima kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan.

Agar implementasi Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan

Keuangan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan dapat tercapai dengan baik maka implementator harus memahami apa saja yang harus dilakukan agar komunikasi dapat terlaksana dengan baik maka menurut Edward III membagi komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa aspek-aspek penting yaitu :

a. Tranformasi Informasi (transimisi)

Tranformasi Informasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksanan kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

b. Kejelasan Informasi (Clarity)

Kejelasan informasi menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan.

c. Konsistensi Informasi (Consistency)

Konsistensi Informasi menghendaki agar Informasi yang disampaikan harus konsisiten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Berdasarkan keterangan kepala Desa Sungai Paduan, bahwa program infrastruktur

dasar pedesaan mulai masuk di Desa Sungai Paduan sejak pertengahan tahun 2012. Namun pada saat itu menurut Kepala Desa, program infrastruktur dasar pedesaan baru sebatas penyampaian informasi (sosialisasi), yang disampaikan dalam musawarah desa. Tahapan-tahapan pelaksanaan dan kegiatan-kegiatan dalam bentuk proyek-proyek yang di biyai program infrastruktur dasar pedesaan itu baru dilaksanakan pada akhir tahun 2012.

Penyampaian informasi mengenai Program infrastruktur dasar pedesaan dilakukan dengan menggunakan cara sosialisasi, sosialisasi dilakukan di desa sungai paduan dengan mengumpulkan seluruh perangkat desa dan masyarakat, sosialisasi dilaksanakan oleh petugas dari dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPMPPDKB) sebagai Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Infrastruktur Dasar Pedesaan (TKPP) Kabupaten Kayong Utara dan didampingi oleh pihak kecamatan Teluk Batang.

Mengenai mekanisme penyampaian informasi dan sosialisasi ini, menurut keterangan informan yang merupakan salah satu Staf Pemberdayaan pada Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan Dan Keluarga Berencana

(BPMPPDKB) Kabupaten Kayong Utara dalam wawancara :

kami sudah melakukan sosialisasi program Infradades ke desa-desa. Kami di bantu oleh fasilitator kecamatan dengan menyelenggarakan musawarah desa, karena program ini baru, kami berkordinasi dengan pihak desa untuk melakukan sosialisasi. Selain menggunakan metode dialog, sosialisasi dilakukan dengan media seperti poster atau baleho yang menunjang kegiatan sosialisasi”

Namun di dapati dilapangan bahwa masyarakat luas belum memperoleh informasi dari pihak-pihak yang terkait, sehingga masyarakat belum memahami program infrastruktur dasar pedesaan, Berdasarkan pernyataan dari wawancara dengan salah seorang Warga Masyarakat/Tokoh Pemuda adalah :

program Infradades, waktu program ini masuk kedesa sungai paduan saya sebagai masyarakat desa sungai paduan tidak ada mendapatkan undangan musawarah. Saya hanya melihat ada beberapa baleho yang dipasang di depan kantor desa, di perbatasan desa, dan di jalan ada beberapa baleho yang dipasang. Mungkin kami masarakat sini sudah diwakili oleh ketua RT dan kepala dusun. Biasa nya kalau ada informasi mengenai

program atau kegiatan apa pun yang akan dilaksanakan didesa kita pasti ada pembritahuan desa melalui RT setempat, Ketua RT yang jalan kerumah-rumah memberi tahu kami. Atau melakukan musawarah Rt, Tapi dalam program infradades memang tidak ada sama sekali pemberitahuan dari desa atau ketua RT.

Dari penjelasan hasil wawancara diatas penulis mendapatkan dalam pelaksanaan penyampaian program infrastruktur dasar pedesaan terjadi komunikasi yang belum baik antara pelaksana program tingkat desa dengan masarakat luas.

Masyarakat belum mendapatkan informasi program infrastruktur dasar pedesaan dari pihak-pihak pelaksanan program ditingkat desa, hanya sebagian masyarakat yang diutamakan dan dilibatkan dalam penyampaian informasi program infrastruktur dasar pedesaan. Menurut kepala Desa dengan keterwakilan aparatur desa dan tokoh-tokoh masyarakat sudah cukup untuk mewakili aspirasi masyarakat luas. Padahal tujuan dari program infrastruktur dasar pedesaan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat luas dan menumbuh kembangkan swadaya masyarakat.

Dari penyampaian informasi sosialisasi terjadi komunikasi yang belum baik antara pelaksana program tingkat desa dengan masyarakat luas, masyarakat belum mendapatkan informasi program infrastruktur dasar pedesaan dari pihak-pihak pelaksanan program ditingkat desa, hanya sebagian masyarakat yang diutamakan dan dilibatkan dalam penyampaian informasi program infrastruktur dasar pedesaan. Padahal keterwakilan aparatur desa dan tokoh-tokoh masyarakat tidak serta merta merupakan representasi kalangan warga masyarakat luas, terutama dalam tujuan memberdayakan masyarakat.

Kurang intensifnya komunikasi dalam pelaksanaan program infrastruktur dasar pedesaan di Desa Sungai Paduan, mengakibatkan proses implementasi program tersebut terutama dalam pembangunan infrastruktur desa belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan dari program infrastruktur dasar pedesaan. Ada banyak hal yang masih banyak belum dimengerti oleh pelaksana program maupun petugas TPK selaku tim pelaksana kegiatan yang ada di setiap dusun.

B. Sumber Daya

Menurut Edward III membagi sumberdaya yang mempengaruhi implementasi kebijakan menjadi beberapa aspek. Aspek-aspek itu lah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program seperti yang terjadi pada pelaksanaan program Infradades di desa Sungai Paduan. Adapun aspek-aspek tersebut ialah sumberdaya manusia (staff), anggaran (budgetary), fasilitas (facility).

Pelaksana program Infradades ditingkat desa adalah aparat desa dan TPK yang dipilih oleh masyarakat melalui musawarah desa. pada kenyataanya di Desa Sungai Paduan masih banyak pelaksana program Infradades yang kurang memahami peran mereka dalam pelaksanaan program Infradades, sehingga menimbulkan kebingungan yang mengakibatkan belum efektifnya kegiatan-kegiatan program Infradades yang sudah terealisasi.

Diakui oleh bapak Kepala Desa dalam wawancara, Sumber daya manusia yang ada masih dirasakan sangat kurang dalam menunjang tugas pokok fungsi pelaksana kebijakan. Selain itu sumber daya manusia yang ada masih kurang terampil dibidangnya hal ini dikarenakan Sumber daya manusia yang ada sekarang rata-rata hanya lulusan SD, SLTP dan SLTA. Sebagai

berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa :

Kami akui sumber daya manusia dalam struktur desa masih sangat kurang, karena orang – orang yang ada di struktur desa hanya tamatan sekolah SD, SLTP, SLTA. Itu salah satu kelemahan kami di dalam struktur desa untuk mengelola dan mengembangkan lebih baik Program-Program yang ada.

Menurut informasi yang diperoleh dari ketua TPK, diperoleh keterangan bahwa ada kecenderungan pandangan yang sama sebagaimana yang diungkapkan Kepala Desa, yaitu memperhatikan kondisi sumberdaya manusia sebagai pelaksana program Infradades selama ini, dimana kegiatan program belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan belum memadainya kemampuan manusianya yang tidak memadai dan tidak kompeten dibidangnya, disebabkan karena latar belakang pendidikan yang relatif rendah. Ditambah lagi selama ini belum pernah ada pelatihan-pelatihan berkait pelaksanaan program Infradades kepada aparatur desa dan TPK sehingga program Infradades belum terlaksana dengan efektif.

Kualitas sumber daya manusia yang belum maksimal dan tidak kompeten, dikarenakan latar belakang pendidikan yang

rendah dan ditambah lagi tidak ada pelatihan-pelatihan mengenai program kepada sumberdaya manusia. Sifat para sumber daya manusia pelaksana program Infradades ditingkat desa cenderung terlihat belum bersungguh-sungguh melaksanakan program Infradades, yaitu kurang nya dedikasi para sumber daya manusia sebagai pelaksana ditingkat desa, hal ini terlihat dari tahapan penyampaian informasi program Infradades kepada masyarakat, masyarakat luas belum memperoleh informasi program Infradades dari pihak-pihak yang terkait, ini membuat masyarakat tidak tahu dan cenderung tidak peduli dengan program Infradades.

Selanjutnya sifat para sumber daya manusia sebagai pelaksana program ditingkat desa terlihat dari data realisasi kegiatan program Infradades selama dua tahun. Kegiatan program Infradades yang sudah terealisasi hanya berjalan apa adanya saja, tidak ada kegiatan yang bervariasi dan kegiatan hampir sama dari tahun pertama dan tahun kedua. Dari data tersebut dapat dilihat sifat sumber daya manusia sebagai pelaksana program ditingkat desa belum inovatif, tidak ada kreatifitas untuk mencari hal-hal yang baru.

Fasilitas infrastruktur desa yang cukup baik namun tidak didukung oleh

sumberdaya manusia yang kompeten dibidangnya merupakan kelemahan dalam pelaksanaan program Infradades di Desa Sungai Paduan. Anggaran dana yang dicairkan tidak sesuai dengan proposal pengajuan kegiatan yang sudah direncanakan oleh pihak desa, ini membuat program Infradades hanya berjalan apa adanya saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor sumberdaya yang terdapat di Desa Sungai Paduan masih kurang baik dalam Implementasi Program Infradades.

C. Disposisi

Aspek disposisi atau sikap pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan public kecendrungan sikap pelaksanaan akan nampak pada seberapa jauh para pelaksana kegiatan menerima memahami dengan sepenuh hati dalam mengimplementasikannya.

Demikian juga sebaliknya sikap pelaksana program akan menolak untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab. Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan

misalnya komitmen dan kejujuran yang tinggi.

Komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi, tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan, ada beberapa kegiatan program Infradades yang sudah terealisasi fiktif, salah satunya kegiatan pembelian tanah sekolah Rt.14 Dusun Sinar Timur, penulis tidak menemukan lokasi tanah sekolah yang berada di Rt. 14 Dusun Sinar Timur. Ditambah lagi ketika penulis meminta laporan pertanggung jawaban kegiatan yang sudah terealisasi kepada aparat desa, penulis tidak menemukan laporan program dari semua yang sudah terealisasi, ada pun laporan pertanggung jawaban kegiatan yang penulis temukan sangat membingungkan antara laporan pencairan tahap satu dengan tahap dua sangat berbeda.

Menurut analisis penulis sehubungan dengan implementasi program infrastruktur dasar pedesaan di Desa Sungai Paduan tidak terlepas dari adanya sikap (kecendrungan) pelaksanaan program yang belum memiliki

komitmen yang tinggi dalam melaksanakan Program Infradades. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya kesadaran dan kemampuan dalam memahami teknis-teknis dalam menganalisis mekanisme dan prosedur pelaksanaan program seperti yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan oprasional progam Infradades.

Lebih lanjutnya, penulis melihat tidak ada kemauan yang kuat dan antusias untuk mengelola program infrastruktur dasar pedesaan. Yang ada hanyalah kepentingan-kepentingan Aparatur Desa antara lain mengamankan agar prioritas kegiatan sesuai dengan keinginan mereka seperti kegiatan-kegiatan fisik yang nanti prokyeknya jatuh ketangan mereka, kemudian agar yang dapat mengerjakan adalah orang-orang yang mereka tunjuk, kepentingan agar mereka mendapatkan jumlah keuntungan dari tiap proyek kegiatan yang dijalankan. Sederhanya adalah agar proyek-proyek kegiatan mereka yang dapat dan kelola, sehingga mereka yang mendapat keuntungan finansial dan keuntungan lainnya dari kegiatan program infrastruktur dasar pedesaan.

D. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) struktur birokrasi merupakan

faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur organisasi mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standar operation prodecure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Jika tidak ada kejelasan dan hubungan terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan sulit bisa dicapai. Dengan demikian para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.

Secara umum penjelasan yang penulis dapatkan dari TPK bahwa pelaksanaan program infrastruktur dasar pedesaan memang tidak sesuai prosedur – prosedur yang ada, sering terjadi pemangkasaan pada prosedur mekanisme yang dilakukan oleh Aparatur Desa, perencanaan dan tahapan-tahapan program infrastruktur dasar pedesaan yang seharusnya dilakukan oleh TPK melalui musawarah dusun namun langsung di ambil alih oleh Aparatur Desa.

Aparatur desa yang menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang menjadi program infrastruktur dasar pedesaan, pihak TPK hanya menanda tangani proposal pengajuan kegiatan yang sudah dibuat oleh pihak Aparatur Desa.

Dari penjelasan pihak TPK diatas dapat dipahami yang terjadi adalah model birokrasi Tradisional, dalam Implementasi program infrastruktur dasar pedesaan di Desa Sungai Panduan pada akhirnya menciptakan ketergantungan aparat birokrasi di tingkat bawah kepada aparat birokrasi ditingkat atas. Dimana apabila ditemui kondisi lapangan di tingkat desa Pihak TPK untuk mengambil sebuah kebijakan atau tindakan tidak serta merta dapat mereka lakukan, harus terlebih dahulu meminta keterangan atau arahan dari kepala Desa.

KESIMPULAN

Belum efektifnya implementasi program infrastruktur dasar pedesaan dalam rangka meningkatkan Infrastruktur desa di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu :

a. Komunikasi

Penyampain Informasi Program infrastruktur dasar pedesaan belum disosialisasikan dengan jelas dan intensif

kepada pelaksana program ditingkat desa, serta masyarakat luas belum mendapatkan informasi program infrastruktur dasar pedesaan dari pihak-pihak pelaksana program ditingkat desa. hal ini membuat masyarakat belum memahami program infrastruktur dasar pedesaan serta enggan untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan program Infrdadades.

b. Sumber Daya

Implementasi program infrastruktur dasar pedesaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan belum didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya, ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan para pelaksana program ditingkat desa sangat rendah, Serta dukungan dana yang tidak memadai sehingga membuat program infrastruktur dasar pedesaan hanya berjalan dengan apa adanya saja.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Implementasi program infrastruktur dasar pedesaan di Desa Sungai Paduan tidak terlepas dari adanya sikap (kecendrungan) pelaksanaan program yang belum memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan program infrastruktur dasar pedesaan. tidak ada kemauan yang kuat dan antusias untuk mengelola program infrastruktur dasar pedesaan. Yang ada hanyalah kepentingan-

kepentingan aparatur desa seperti kegiatan-kegiatan pembangunan fisik, sehingga mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan program Infradades.

d. Struktur Birokrasi

Dalam Implementasi program infrastruktur dasar pedesaan di Desa Sungai Paduan terjadi model birokrasi Tradisional, menciptakan ketergantungan aparat birokrasi di tingkat bawah kepada aparat birokrasi ditingkat atas. Menyebabkan terjadi pemangkasaan pada prosedur mekanisme yang dilakukan oleh aparatur desa dalam setiap tahapan-tahapan program Infradades. Sehingga menyebabkan dominan nya peran kepala desa dalam implementasi program infrastruktur dasar pedesaan di Desa Sungai Paduan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, dapat dikemukakan saran-saran sebaai berikut :

- a. Perlunya peningkatan sosialisasi dan waktu sosialisasi yang panjang dalam penyampaian Informasi program infrastruktur dasar pedesaan kepada seluruh pihak pelaksana program ditingkat desa. Hal ini bertujuan agar pelaksana program ditingkat desa benar-

benar memahami dan mengerti program infrastruktur dasar pedesaan sesuai dengan petunjuk pelaksana dan sejalan dengan tahapan-tahapan program infrastruktur dasar pedesaan. Salah satunya tahapan penyampaian Informasi program infrastruktur dasar pedesaan kepada masyarakat luas harus ditingkatkan dengan menggunakan berbagai media-media yang ada di Desa Sungai Paduan. Sehingga terbuka ruang publik lebih untuk memberi kesempatan dan membuka peluang kepada masyarakat luas terutama dari kalangan masyarakat yang menjadi sasaran untuk terlibat dalam tahapan-tahapan kegiatan Program infrastruktur dasar pedesaan.

- b. Dapat diketahui bahwa pelaksana program infrastruktur dasar pedesaan ditingkat desa memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, maka dari itu pelaksana program infrastruktur dasar pedesaan ditingkat Kabupaten dan pelaksana program infrastruktur dasar pedesaan ditingkat Kecamatan perlu berupaya memberikan pendampingan, bimbingan dan pembinaan baik melalui pelatihan-pelatihan dan sebagainya, hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia pelaksana program infrastruktur dasar pedesaan

ditingkat desa. agar sumber daya manusia Pelaksana Program ditingkat desa memiliki kapasitas yang memadai dan kompeten dalam tahapan-tahapan Program infrastruktur dasar pedesaan.

- c. Perlunya pendampingan dan pengawasan secara langsung oleh pelaksana program tingkat kecamatan agar pelaksana program ditingkat desa memiliki sikap komitmen yang tinggi serta dapat memahami tahapan-tahapan dalam menganalisis prosedur dan mekanisme pelaksanaan program seperti yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan operasional program infrastruktur dasar pedesaan.
- d. Implementasi program infrastruktur dasar pedesaan guna pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan proses pembinaan yang intensif, terutama oleh tenaga fasilitator tingkat Kabupaten yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pengorganisasian masarakat dan pemberdayaan masarakat. Hal ini bertujuan agar para pelaksanan program ditingkat desa aktif dan mengerti tugasnya dibidang masing-masing. serta mengurangi dan menghilangkan pemangkasan prosedur agar tidak menciptakan ketergantungan

aparatur birokrasi ditingkat bawah kepada aparat birokrasi ditingkat atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Badjuri, Abdulkahar., Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Humaidi, S.U., 1993. *Mengenai Ilmu Kebijakan Publik*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah.
- Islamy, Irfan. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moenir, H. A. S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy, 2011. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja posda karya
- Mustopadidjaja. A. R., 1992. *Studi Kebijaksanaan, Perkembangan dan Penerapannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LP FEUI.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi teory dan praktik/* Surabaya: CV. Putra Media Nusantara
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Tachjan, H. 2006. *Implenemtasi Kebijakan Publik*. Cetakan I. Bandung: Pusli KP2W Unpad
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Pengantar Kebijakan Negara*, Jakart: Rhimena Cipta
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyu Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Pressindo
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Prasetyo Budi Saksono, 1984.. *Dalam Menuju SDM Berdaya*. Bumi Aksara. Jakarta
- Anwar. 2005. *Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah*. PT. Media Tama. Jakarta.
- Ginting. S.P, 1998. *Sistim Pemerintahan Desa*. Gadjah Mada University Press. PT. Permata Artistika Kreasi. Depok.
- Emitai Etzioni 1994. *Analisis Kebijakan*. (Artikel). Visimedia. Jakarta.
- Martoyo 1998 *Sistim Pemerintahan Desa*. (Artikel). Press. Yogyakarta
- Wresniwiro, 2007. *Membangun Republik Desa*. Visimedia. Jakarta.
- Komaruddin. 1994. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta

Peraturan Pemerintah

- Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2012. *Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuanagan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan*.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : REZA ARISTA SAPUTRA
NIM / Periode lulus : E01109063 /
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / IA.
E-mail address/HP : Reza.Arista.ra@gmail.com / 007018054560

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi Ilmu Administrasi M. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Program Bantuan Keuangan Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Dasar Pengeskan Di Desa
Sungai Pagan Kecamatan Geluk Kabupaten Kutai Utara.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 5-6-2015
Dr. ARIFIN, M.AB.
NIP. 197105021997021002

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

Dibuat di :
Pada tanggal: 3-6-2015

REZA ARISTA SAPUTRA
nama terang dan tanda tangan mhs

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).